IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

KAPd

Letter of Acceptance

Kepada Yth.
Siti Maghfiroh

Terima kasih atas kiriman paper Anda kepada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) yang ke-23 Virtual. Paper Anda diterima untuk dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-23 Virtual. Informasi tentang paper Anda adalah sebagai berikut :

Judul paper :
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat (Perbandingan Rasio Keuangan Berdasarkan Standar Indonesia Dan Australia)
Penulis :
Sharfina Azalia - UNSOED
Oman Rusmana - UNSOED
Siti Maghfiroh - UNSOED

Surat ini kami sampaikan untuk membantu Anda mendapatkan dana untuk keperluan menghadiri SNA ke-23 Virtual.

Kami berharap Anda dapat hadir dan mempresentasikan paper Anda di SNA ke-23 Virtual.

Yogyakarta, 01 July 2020
Hormat Kami,

Syaiful Ali., MIS., Ph.D., CA.

Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat (Berdasarkan Standar Yang Digunakan Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Australia)

Sharfina Azalia
Alumni Akuntansi UNSOED
sharfinazl64@gmail.com

Oman Rusmana
UniversitasJenderal Soedirman
Oman_rusmana@gmail.com

Siti Maghfiroh
UniversitasJenderal Soedirman
firoh.sutanto@gmail.com

ABSRACT: *This study aims to find out and analyze the differences in performance of LKPP by using financial statement ratio analysis standards in Indonesia with a standard financial ratio analysis in Australia. As well as knowing and analyzing differences in the ratio of financial statements to standards in Indonesia and standards in Australia.*

This study uses secondary data. Where, the data obtained comes from LKPP. The data obtained data from 2012 to 2016. This study uses descriptive analysis method, which is a study by collecting, compiling, processing, and analyzing numerical data, in order to provide an overview of a particular situation so that conclusions can be drawn.

The results of this study indicate that the calculation of six analysis ratios, namely (current ratio, solvability ratio, income effectiveness ratio, expenditure efficiency ratio, income growth ratio, expenditure growth) found in Indonesia can be seen as being able to meet financial performance assessments in Indonesia with data obtained from the Central Government financial report (LKPP). There is a standard calculation ratio found in Australia that can be a reference for calculation ratio analysis in Indonesia, namely interest coverage where the central government gets information about how much interest must be paid from the cost of the loan for the year.

Keywords: *Financial statements, financial ratios, government financial standards, and financial performance.*

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan tidak dapat dilihat secara umum, perlu kemampuan atau tahapan analisis untuk dapat memberikan gambaran yang lebih akurat. Analisa Laporan Keuangan menyangkut pemeriksaaan keterkaitan angka–angka dalam laporan keuangan dan trend angka – angka dalam beberapa periode, satu tujuan dari analisis laporan keuangan menggunakan kinerja Instansi yang lalu untuk memperkirakan bagaimana akan terjadi dimasa yang akan datang.

Sejumlah negara memiliki perbedaan yang sangat besar dalam praktik-praktik akuntansi dan auditnya, kualitas pengungkapan, sistem hukum dan undang-undang, sifat dan ruang lingkup

resiko usaha, serta cara untuk menjalankan bisnis. Analisis dan penilaian keuangan internasional ditandai dengan banyak kontradiksi. Di satu sisi, begitu cepatnya proses harmonisasi standar akuntansi telah mengarah pada semakin meningkatnya daya banding informasi keuangan di seluruh dunia. Terlepas dari konradiksi yang masih terus berlanjut, hambatan untuk analisis dan penilaian keuangan internasional semakin menurun dan pandangan pada analisis secara umum masih positif. Globalisasi pasar modal, kemajuan dalam teknologi informasi dan kompetisi antar Pemerintah nasional, bursa efek dan perusahaan-perusahaan untuk menarik investor dan kegiatan perdagangan yang meningkat masih terus berlanjut.

Kinerja suatu Instansi dipengaruhi oleh baik buruknya sebuah Laporan keuangan dari Instansi tersebut. Karena sebuah Instansi dan laporan keuangan memiliki keterkaitan. Performansi suatu Instansi dapat dilihat melalui laporan keuangan, dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan finansial dari hasil – hasil yang telah dicapai Instansi selama periode tertentu. Tingkat kinerja Instansi dapat diketahui melalui analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan.

Hasil analisis tersebut dapat diketahui prestasi dan kelemahan yang dimiliki Instansi, sehingga dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atau analisis laporan keuangan suatu Instansi adalah sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi yang bersangkutan meskipun kepentingan mereka masing-masing berbeda.

Untuk dapat menggambarkan tentang perkembangan finansial suatu Instansi, perlu menganalisis atau interprestasi terhadap data finansial dari Instansi yang bersangkutan, dimana data finansial itu tercermin didalam laporan keuangan. Metode yang sering digunakan dalam analisa finansial adalah rasio.

Masih banyak fenomena laporan keungan Pemerintah yang belum menyajikan data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) meningkat. Hal ini juga yang telah mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntansi publik.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1 New Public Management

New Public Management (NPM) merupakan suatu teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Paradigma *New Public Management* merupakan sebuah fenomena yang mendunia dan ditandai dengan terjadinya *trend* di dunia yang mengarah pada penggunaan anggaran berbasis kinerja, manajemen berbasis hasil, dan penggunaan akuntansi berbasis akrual (Mahmudi, 2010). NPM berusaha untuk merubah sektor publik melalui reformasi organisasi yang berfokus kepada hasil dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan teori politik Pemerintahan (Stoker dalam Ewalt, 2001).

Di suatu Instansi Pemerintah, kinerja merupakan orientasi yang utama bukan pada kebijakan. Berdasarkan hal tersebut apabila suatu Instansi memahami tujuan yang dicapai serta berkomitmen untuk mencapai kinerja yang baik maka akan mempengaruhi tindakan dan konsekuensi kinerjanya. Jika konsekuensi dan tindakan tersebut berjalan dengan baik, maka akan mewujudkan good governance.

New Public Management mengupayakan dengan mereformasi *sector public* agar tujuan yang dicapai lebih efektif, efesien dan ekonomis, semata-mata hanya menunjukan kepada kita

tentang hubungan antara Negara (*the state*) dan pasar (*the market*) dan lebih menekankan eksplisit ditujukan pada adanya dominasi preferensi individu terhadap penyediaan barang dan jasa atas preferensi kolektif. Kita perlu menyadari bahwa Pemerintahan yang modern itu bukan hanya sekedar mencapai tujuan efisiensi tetapi tentang hubungan akuntabilitas terhadap Negara dengan warga Negaranya yaitu warga meminta agar tidak diperlakukan hanya sebagai konsumen dan pelanggan tetapi mereka juga memiliki hak untuk menuntut pemerintahannya bertanggung jawab atas tindakan yang diambil atau kegagalan dalam bertindak /melakukan sesuatu.

Penerapan *new public managementi* di Indonesia sangat berkaitan dengan penelitian ini dimana penggunaan akuntansi berbasis akrual ada di dalam teori ini. Dengan metode basis akrual yang juga digunakan di Indonesia dan Australia maka dalam penelitian ini ingin menganalisis perbedaan yang ada di dalam standar yang digunakan di Indonesia dan Australia. Dan manfaatnya bagi kinerja laporan keuangan di Indonesia.

2.2 Agency Theory

Keberadaan teori agensi didalam Pemerintahan digambarkan dengan jelas oleh Mahmudi (2010). Di dalam sistem Pemerintahan demokrasi, hubungan antara Pemerintah dan masyarakatnya dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, Pemerintah sebagai agen yang diberikan suatu kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh masyarakat sebagai *principal*, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Maka dari itu, Hubungan antara Pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah pertanggungjawaban, dalam hal ini Pemerintah sebagai agen harus mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat yang telah memberikan dananya. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ini disebut dengan akuntabilitas publik. Berdasarkan teori keagenan, tidak ada jaminan bahwa agen (Pemerintah) selalu bertindak atas kepentingan *principal* (masyarakat). Pemerintah sebagai agen dalam hal ini mempunyai perilaku oportunis, yaitu bertindak untuk kepentingan dan kesejahteraannya sendiri bukan kesejahteraan masayarakat yang menjadi *principal*.

Penelitian ini Pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal* Pemerintah bertanggungjawab mengatur keuangannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan menunjukan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Di dalam Pemerintahan Pusat terdapat hubungan dan masalah keagenan. Hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan Pemerintah sebagai agen. Bagaimana Pemerintah dapat menghasilkan suatu kinerja yang baik dapat dilihat dari hasil laporan keuangan dari LKPP dan sudah melalui tahapan analisis rasio keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat sebagai *principal*.

2.3 International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

IPSASB bertujuan untuk memperkuat manajemen keuangan publik dan pengetahuan secara global melaluipeningkatan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan sektor publik dengan:

a. Mengembangkan standar pelaporan keuangan sektor publik berkualitas tinggi;
b. Mengembangkan publikasi lain untuk sektor publik; dan
c. Meningkatkan kesadaran IPSASdan manfaat bagi pihak yang mengadopsi IPSAS.

Laporan keuangan menurut IPSAS:

a. Menurut IPSAS (International Public Sector Accounting Standard) laporan keuangan akrual secara umum setidaknya terdiri dari
b. *Statement of Financial Position* (Neraca)
c. *Statement of Financial Performance* (laporan kinerja keuangan)

d. *Statement of Changes In Net Assets/Equity* (laporan perubahan dalam Aset Bersih/Ekuitas)
e. *Cash Flow Statement* (laporan arus kas)
f. *Accounting Policies and Notes to The Financial Statement* (catatan atas kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan)

2.4 Australian Accounting Standards Board (AASB)

AASB adalah lembaga pemerintah Australia yang mengembangkan dan memelihara standar pelaporan keuangan yang berlaku untuk entitas di sektor swasta dan publik dari ekonomi Australia.

AASB mempunyai tanggung jawab untuk membuat standar baik sektor publik maupun sektor pribadi dan bebas untuk mencari tim dan staf. AASB menggunakan kerangka kerja konseptual, yang meliputi Laporan Akuntansi Konsep (SAC 1 Definisi Pelapor dan SAC 2 Tujuan - Tujuan Umum Pelaporan Keuangan) yang dikembangkan oleh mantan AASB dan Sektor Publik Dewan Standar Akuntansi (PSASB), untuk mengevaluasi usulan standar akuntansi.

2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Dan Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi:

a. aset
b. liabilitas
c. ekuitas
d. pendapatan
e. beban termasuk keuntungan dan kerugian
f. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
g. arus kas.

Menurut UU no 17 Tahun 2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah gambaran tentang neraca / laporan posisi keuangan, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal dari suatu instansi yang terjadi pada saat tertentu. Laporan keuangan ini diperlukan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, Pemerintah dan masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan biasa dibuat oleh perusahan pada akhir periode atau pada akhir tahun buku. Laporan keuangan dapat dibuat secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Namun untuk kepentingan pihak eksternal laporan keuangan dibuat secara tahunan.

2.6. Kinerja Keuangan

2.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan dan Penilaian Kinerja

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu Instansi. Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau Instansi dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang yang dilihat dari segi pengelolaannya, pergerakannya, maupun tujuannya.
Pengertian kinerja menurut Jumingan (2006:239), adalah sebagai berikut:

> "kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai Instansi dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknolog, maupun aspek sumber daya manusia".

Kinerja keuangan akan dianalisis dengan menggunakan enam indikator pengukuran kinerja. Keenam indikator pengukuran kinerja yang akan dianalisis adalah rasio keuangan likuditas, rasio keuangan solvabilitas, rasio keuangan efektivitas pendapatan, rasio keuangan efisiensi belanja, rasio keuangan pertumbuhan pendapatan serta rasio keuangan pertumbuhan belanja. Masing – masing indikator pengukuran kinerja tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

1. Rasio Lancar (likuiditas)

Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan kemampuan Pemerintah pusat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Mahmudi, 2006). Nilai standar rasio lancar dianggap aman adalah 2:1 dan nilai minimalnya adalah 1:1. Mahmudi (2006) menyatakan bahwa"jika nilai rasio lancar kurang dari 1:1 maka keuangan organisasi tidak lancar ". Mahsun (2009) menyebutkan formula yang digunakan untuk menghitung rasio lancar yaitu:$\frac{A \quad L}{H \quad L}$

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan perbandingan antara jumlah aset pemerintah Pusat terhadap total kewajiban yang dimiliki pemerintah pusat. Rasio solvabilitas meenggambarkan kemampuan pemerintah Pusat untuk membayar seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah pusat, baik jangka pendek maupun jangka panjang.Mahmudi (2006) menyatakan bahwa"nilai minimal rasio solvabilitas dianggap aman adalah 1:1". Menurut Mahmudi (2006) formula yang digunakan untuk menghitung rasiosolvabilitas yaitu: $\frac{T \quad A}{T \quad H}$

3. Rasio Efektifitas Pendapatan

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dengan Anggaran penerimaan yang ditetapkan. Mahsun (2009) menyebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung rasio efektifitas Pendapatan negara yaitu:$\frac{R \quad P \quad P \quad +P}{A \quad P}$

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Mahmudi (2006) menyatakan bahwa "angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi belanja tidak bersifat absolut tetapi realitf". Artinya tidak ada standar baku yang diangggap baik untuk rasio ini. Mahsun (2009) menyebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi belanja yaitu:$\frac{R \quad B \quad A}{A \quad B \quad N}$

5. Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan pendapatan negara dari tahun ke tahun. Jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara negatif maka menunjukan adanya penurunan kinerja pendapatan. Mahmudi (2006) menyebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan pendapatanya itu : $\frac{Pe \quad T\ hu\ n-P \quad T\ hu\ n-1}{P \quad T\ hu\ n-1}$

6. Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja negara dari tahun ke tahun. Mahmudi (2009) mengatakan bahwa Formula yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan belanja yaitu: $\frac{B \quad T\ hu\ n-B \quad T\ hu\ n-1}{B \quad T\ hu\ n-1}$

2.7 Hubungan Kinerja Keuangan dengan Analisis Laporan Keuangan

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu laporan keuangan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan *Financial* dari hasil-hasil yang telah dicapai Instansi selama periode tertentu. Tingkat kesehatan Instansi dapat diketahui melalui analisis atau interprestasi terhadap laporan keuangan. Dari hasil analisis dapat diketahui prsetasi dan kelemahan yang dimiliki Instansi, sehingga dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interprestasi atau analisis laporan keuangan suatu Instansi adalah sangat penting bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan Instansi yang bersangkutan meskipun kepentingan merka masing – masing berbeda.

Salah satu faktor yang sangat penting sehubungan dengan diadakannya analisis dan interprestasi terhadap laporan keuangan yaitu dengan melaukan analisis terhadap laporan keuangan yang berperan dalam berbagai hal seperti:

1. Menentukan laba periode yang akan datang
2. Mengambil keputusan untuk Investasi
3. Dapat meningkatkan efiesiensi
4. Dapat menentukan kebijakan antisipasi hutang

Disamping itu dengan menganalisis laporan keuangan dapat diketahui kondisi keuangan dan kinerja Instansi, dan efisiensi dari manajemen pada suatu periode tertentu.

2.8 Analisis Rasio Keuangan yang Digunakan Luar Negeri

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Pricewaterhouse Coopers (2006) pada Pemerintah di Australia. PwC menggunakan lima rasio keuangan sebagai indikator kunci dalam menilai keberlanjutan fiskal, yang terdiri atas :

1. $S \quad (D \quad)O \quad = O \quad R \quad - O \quad E$
2. $I \quad C \quad = \frac{E}{B \quad C}$
3. $R \quad K \quad = \frac{B \quad M}{D}$
4. $C \quad R \quad = \frac{C \quad A}{C \quad Li}$
5. $R \quad C \quad = \frac{T \quad R \quad R}{T \quad Cos}$

2.9 KERANGKA PENELITIAN

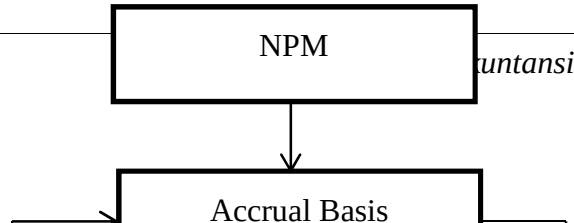

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:15). menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, tekhnik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang benar benar hanya memaparkan apa yang terdapatatau yang terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu.

3.2 Sasaran Penelitian Dan Teknik Analisis Data

Sasaran penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012-2016. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Pricewaterhouse Coopers (2006) pada Pemerintah di Australia. PwC menggunakan lima rasio keuangan sebagai indikator kunci dalam menilai keberlanjutan fiskal, yang terdiri atas :

1. $S \quad (D \quad)O \quad = O \quad R \quad - O \quad E$
2. $I_1 \quad C \quad = \frac{E}{B \quad C}$
3. $R \quad K \quad = \frac{B \quad M}{D}$
4. $C \quad R \quad = \frac{C \quad A}{C \quad Li}$
5. $R \quad C \quad = \frac{T \quad R \quad SR}{T \quad C}$

Jenis rasio keuangan yang kedua adalah yang terdapat dalam buku Kieso, dkk (2014) yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio jaminan (*coverage*). Namun, karena rasio profitabilitas dan aktivitas merupakan rasio yang erat kaitannya dengan organisasi swasta yang identik dengan *profit-oriented* maka rasio profitabilitas tidak digunakan dalam penelitian ini. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang sangat identik dengan keberlanjutan fiskal dimana terlihat bagaimana kemampuan pemerintah dalam melunasi utang-utangnya.

kinerja keuangan akan dianalisis dengan menggunakan enam indikator pengukuran kinerja. Keenam indikator pengukuran kinerjayang akan dianalisis adalah rasio keuangan likuditas, rasio keuangan solvabilitas, rasio keuangan efektivitas pendapatan, rasio keuangan efisiensi belanja, rasio keuangan pertumbuhan pendapatan sertarasio keuangan pertumbuhan belanja. Masing – masing indikator pengukuran kinerja tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

1. Rasio Lancar (likuiditas)

Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lanca rmenggambarkan kemampuan Pemerintah pusat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Mahmudi, 2006). Nilai standar rasio lancar dianggap aman adalah 2:1 dannilai minimalnya adalah 1:1. Mahmudi (2006) menyatakan bahwa“jikanilai rasio lancar kurang dari 1:1 maka keuangan organisasi tidak lancar “. Mahsun (2009) menyebutkan formula yang digunakan untuk menghitung rasio lancar yaitu:$\frac{As \quad L}{H \quad L}$

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan perbandingan antara jumlah aset pemerintah Pusat terhadap total kewajiban yang dimiliki pemerintah pusat. Rasio solvabilitas meenggambarkan kemampuan pemerintah Pusat untuk membayar seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah pusat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mahmudi (2006) menyatakan bahwa “nilai minimal rasio solvabilitas dianggap aman adalah 1:1”. Menurut Mahmudi (2006) formula yang digunakan untuk menghitung rasio solvabilitas yaitu:$\frac{T \quad A}{T \quad H}$

3. Rasio Efektifitas Pendapatan

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dengan Anggaran penerimaan yang

ditetapkan. Mahsun(2009) menyebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung rasio efektifitas Pendapatan negara yaitu:$\frac{R \quad P \quad P \quad +P}{A \quad P}$

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Mahmudi (2006) menyatakan bahwa "angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi belanja tidak bersifat absolut tetapi realitf". Artinya tidak ada standar baku yang diangggap baik untuk rasio ini. Mahsun (2009) menyebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi belanja yaitu:$\frac{R \quad B \quad A}{A \quad B \quad N}$

5. Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan pendapatan negara dari tahun ke tahun.Jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara negatif maka menunjukan adanya penurunan kinerja pendapatan. Mahmudi (2006) menyebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan pendapatan yaitu : $\frac{P \quad T\ hu\ n-P \quad T\ hu\ n-1}{P \quad T\ hu\ n-1}$

6. Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja negara dari tahun ke tahun. Mahmudi (2009) mengatakan bahwa Formula yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan belanja yaitu: $\frac{B \quad T\ hu\ n-B \quad T\ hu\ n-1}{B \quad T\ hun\ n-1}$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umun Objek Penelitian

Menilai baik atau buruknya sebuah kinerja keuangan suatu Pemerintahan, di suatu negara yang telah berjalan. Dapat dinilai dengan beberapa cara analisis perhitungan, yang telah di terapkan di setiap negara – negara tersebut. Seperti negara Australia yang telah terbukti berhasil menerapkan akuntansi berbasis akrual pada keuangan pemerintahannya untuk menilai kinerja keuangannya. Perbedaan dalam cara analisis perhitungan di negara tersebut dengan cara analisis perhitungan yang diterapkan di Indonesia. dapat menjadi sebuah referensi bagi Indonesia untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintahannya, serta bagi negara – negara lain.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Data Kinerja Laporan Keuangan di Indonesia

Menilai kinerja keuangan dalam pemerintahan di Indonesia diketahui dapat dianalisis dengan menggunakan enam indikator pengukuran kinerja. Keenam indikator pengukuran kinerja yang akan dianalisis adalah rasio keuangan likuiditas, rasio keuangan solvabilitas, rasio keuangan efektivitas pendapatan, rasio keuangan efisiensi belanja, rasio keuangan pertumbuhan pendapatan serta rasio keuangan pertumbuhan belanja.

Tabel. 2

Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Untuk Menilai Kinerja Keuangan 2012 – 2016.

Lkpp	Aset lancar	Hutang lancar	Total aset	Total hutang	Realisasi Pendapatan Pajak	PNBP	Anggaran pendapatan
Tahun 2012	Rp. 241,31	Rp.266 ,14	Rp.3432 ,98	Rp.2156 ,89	Rp. 980,52	Rp.351 ,80	Rp.1016 ,24
Tahun 2013	Rp. 252,75	Rp368, 09	Rp. 3567,59	Rp.2652 ,01	Rp.1077 ,31	Rp.354 ,76	Rp.1148 ,37
Tahun 2014	Rp.262 ,98	Rp.352 ,31	Rp. 3910,93	Rp. 2898,39	Rp.1146 ,87	Rp. 398,66	Rp. 1246,11
Tahun 2015	Rp.326 ,76	Rp. 469,23	Rp. 5163,33	Rp. 3493,54	Rp.1240 ,42	Rp. 255,63	Rp.1489 ,26
Tahun 2016	Rp.304 ,62	Rp. 387,45	Rp.5456 ,89	Rp.3889 ,95	Rp. 1284,98	Rp. 261,98	Rp. 1539,17

Lkpp	Realisasi belanja anggaran	Anggaran belanja negara	Pendapatan tahun n	Pendapatan tahun n -1	Belanja tahun n	Belanja tahun n -1
Tahun 2012	Rp.1010,56	Rp.1069,53	Rp.980,52	Rp. 979,52	Rp.1010.56	Rp. 1009.56
Tahun 2013	Rp.1137,17	Rp.1196,83	Rp.1077,31	Rp.1076,31	Rp.1137,17	Rp.1136,17
Tahun 2014	Rp.1203,58	Rp.1280,37	Rp. 1146,87	Rp1145,87	Rp. 1203,58	Rp. 1202,58
Tahun 2015	Rp.1183,31	Rp. 1319,55	Rp. 1240,42	Rp. 1239,42	Rp. 1183,31	Rp. 1182,31
Tahun 2016	Rp. 1154,02	Rp. 1306,67	Rp.1284,98	Rp. 1283,98	Rp. 1154,02	Rp.1153,02

Adapun Perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.
Hasil analisis rasio untuk mengukur kinerja laporan keuangan di Indonesia.

Tahun	Rasio lancar	Keterangan (selisih)	Rasio solvabilitas	Selisih	Rasio efektivitas pendapatan	Keterangan (selisih)	Rasio efisiensi belanja	Keterangan (selisih)
2012	90,6	-	159,16	-	98,05%	-	94,49	-

	%		%				%	
2013	68,6 %	-22%	134,52 %	-24,64 %	107,77 %	9,72%	95,02 %	0,53%
2014	74,6 %	6%	134,93 %	0,41%	114,72 %	6,95%	94,01 %	-1,01%
2015	69,6 %	-5%	147,79 %	12,86 %	124,06 %	9,34%	89,68 %	-4,33%
2016	78,6 %	9%	140,28 %	-7,51%	128,52 %	4,46%	88,32 %	-1,36%
	Rata – rata	-3%	Rata – rata	-4,72%	Rata-rata	7,62%	Rata - rata	-1,54%

Tahun	Pendapatan Negara	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Selisih	Belanja Negara	Rasio Pertumbuhan belanja	Selisih
2011	1210,6	-	-	1295,00	-	-
2012	1338,11	0,11	-	1491,41	0,15	-
2013	1438,89	0,08	-0,03	1650,56	0,11	-0,04
2014	1550,49	0,08	0,00	1777,18	0,08	-0,03
2015	1508,02	-0,03	-0,10	1806,51	0,02	-0,06
2016	1555,93	0,03	0,06	1864,27	0,03	0,02
	Rata-Rata		-0,02	Rata-Rata		-0,03

4.2.2 Analisis Data Kinerja Laporan Keuangan Dengan Dasar Perhitungan Australia.

Menilai kinerja keuangan dalam pemerintahan di Indonesia diketahui dapat dianalisis dengan menggunakan enam indikator pengukuran kinerja. Keenam indikator pengukuran kinerja yang akan dianalisis adalah rasio keuangan likuiditas, rasio keuangan solvabilitas, rasio keuangan efektivitas pendapatan, rasio keuangan efisiensi belanja, rasio keuangan pertumbuhan pendapatan serta rasio keuangan pertumbuhan belanja. Selain dengan enam indikator perhitungan tersebut, pada penelitian ini juga menggunakan dasar perhitungan Australia untuk mengukur kinerja laporan keuangan dari LKPP.

Tabel 4.
Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Tahun 2012 – 2016.

Lkpp	*Earnings* / Pendapatan	*Borrowing costs* / Biaya Pinjaman
Tahun 2012	1338,11	799,68
Tahun	1438,9	474,48

2013		
Tahun 2014	1550,5	949,97
Tahun 2015	1508,02	832,40
Tahun 2016	1555,94	334,51

Adapun Perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Laporan Keuangan Dengan Standar Perhitungan Australia.

Tahun	*Interest coverage* / Bunga	Keterangan (selisih)
2012	167,3 %	-
2013	303,3%	135,9%
2014	163,2%	-140,0%
2015	181,2%	17,9%
2016	465,1%	284,0%
	Rata – rata	74,5%

4.3 Pembahasan

Dalam perhitungan keenam analisis rasio yang terdapat di Indonesia dapat di ambil kesimpulan bahwa untuk rasio lancar selama periode 2012 – 2016 belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dikarenakan hasil dari perhitungan selama periode tersebut dibawah batas minimal standar. Rasio solvabilitas selama periode 2012 – 2016 telah memenuhi standar dilihat dari hasil perhitungan yang berada di atas standar aman yaitu 2:1. Rasio efektivitas pendapatan pada periode 2012 – 2016 telah memenuhi anggaran penerimaan yang telah dianggarkan pemerintah. Rasio efisiensi belanja pada periode 2012 – 2016 terlihat bersifat relatif dari angka yang terdapat dari hasilnya. Pertumbuhan pendapatan pada periode 2012 – 2016 terlihat dominan dengan kenaikan pendapatan pada setiap tahunnya. Pertumbuhan belanja pada periode 2012 – 2016 terlihat pada setiap tahunnya mengalami kenaikan pada belanja negara.

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan sebagaimana telah disajikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Enam analisis Rasio yaitu (rasio lancar, rasio solvabilitas, rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja) yang terdapat di Indonesia dapat dilihat mampu untuk memenuhi penilaian kinerja keuangan di indonesia dengan data yang didapatkan dari laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
2. Semua analisis rasio yang terdapat di Indonesia dapat menilai meningkat atau menurunnya sebuah data yang akan dihitung.

3. Dalam perhitungan keenam analisis rasio yang terdapat di Indonesia dapat di ambil kesimpulan bahwa untuk rasio lancar selama periode 2012 – 2016 belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dikarenakan hasil dari perhitungan selama periode tersebut dibawah batas minimal standar. Rasio solvabilitas selama periode 2012 – 2016 telah memenuhi standar dilihat dari hasil perhitungan yang berada di atas standar aman yaitu 2:1. Rasio efektivitas pendapatan pada periode 2012 – 2016 telah memenuhi anggaran penerimaan yang telah dianggarkan pemerintah. Rasio efisiensi belanja pada periode 2012 – 2016 terlihat bersifat relatif dari angka yang terdapat dari hasilnya. Pertumbuhan pendapatan pada periode 2012 – 2016 terlihat dominan dengan kenaikan pendapatan pada setiap tahunnya. Pertumbuhan belanja pada periode 2012 – 2016 terlihat pada setiap tahunnya mengalami kenaikan pada belanja negara.
4. Terdapat satu standar rasio yang diterapkan di Australia yaitu *interest coverage*, yang dimana pada *interest coverage* pada periode 2012 – 2016 terlihat jumlah bunga yang dominan meningkat pada setiap tahunnya.
5. Terdapat satu standar rasio perhitungan yang terdapat di Australia yang dapat menjadi suatu referensi bagi analisis rasio perhitungan di Indonesia yaitu *interest coverage* dimana pemerintah pusat mendapatkan informasi mengenai berapa besar bunga yang harus dibayar dari biaya pinjaman pada tahun tersebut.
6. Indonesia dapat menggunakan *interest coverage ratio* disaat kondisi keuangan negara sedang tidak sehat. Hal tersebut untuk mengantisipasi pengeluaran yang lebih besar ketika saat akan meminjam uang pada saat kondisi keuangan negara yang tidak sehat.

5.2 Implikasi dan Saran

Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan standar rasio yang terdapat pada analisis perhitungan rasio yang terdapat di Australia, agar dapat lebih mudah membandingkan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang dihitung dari laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Bagi penelitian selanjutnya pengambilan referensi dan akses untuk mengambil informasi data terkait standar yang terdapat di Australia sangat penting untuk mengolah data dalam laporan keuangan pemerintah pusat.

Melihat standar keuangan yang digunakan oleh Australia yaitu *Australian Accounting Standards Board* (AASB). Yang akan memberikan informasi yang sangat penting dan berguna untuk mendapatkan penelitian yang lebih obyektif dan lengkap dari segi informasi dan data.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu tidak tersedianya standar yang dipakai oleh analisis rasio yang terdapat di Australia dan memberikan kesulitan bagi peneliti dalam mengolah data, menghitung, membandingkan dan menyimpulkan data yang ada pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Dengan keterbatasan tersebut akan sulit untuk menilai kinerja keuangan pada periode tahun tertentu telah memenuhi standar atau tidaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Indonesia.*Anggaran pendapatan dan belanja indonesia*.Online.https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia. Diakses pada tanggal 5 Desember 2017 Pukul 12 : 42 WIB

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Anggaran pendapatan dan bealanja negara. Online. https://zehanwidiastuti.wordpress.com/2013/06/28/anggaran-pendapatan-dan-belanja negara-apbn/. Diakses pada tanggal 5 Desember 2017 Pukul 12 : 40 WIB.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Australian Government. *Australian Accounting Standards Boards*.http://www.aasb.gov.au/AASB-Board.aspx. Diakses pada tanggal 13 April 2018 Pukul 17:05

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporab keuangan Pemerintah Pusat. Online. http://www.bpk.go.id/lkpp. Diakses pada tanggal 30 November 2017 Pukul 07 : 20 WIB

Contoh Laporan keuangan.*Contoh laporan keuangan.* Universitas Andalas 2012. http://repo.unand.ac.id/1211/2/bab%25201.pdf. Diakses pada tanggal 22 November 2017 Pukul 21 : 15 WIB

Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. 2014. *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill.

Coopers PriceWaterHouse. 2006.*The World in 2050*, Price WaterHouse Coopers.

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Indeks, Jakarta.

Fields, Edward. 2002. *The Essentials of Finance and Accounting for Nonfinancial Managers.* AMACOM. New York.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Harnanto, 1991. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: YKPN

IAI, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan,* Jakarta : Salemba Empat

IPSASB. 2016. *International Public Sector Accounting Standards Board Fact Sheet.*https://www.google.co.id/search?q=australian+accounting+standard+board&oq=australian+accounting+standard+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.24260j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Di akses pada tanggal 13 April 2018 Pukul 17:05 WIB

Jaelani, Anggi. 2016.*Pajak Negara dan Pajak Daerah*.Onlinehttp://ghiezaenimotivator.blogspot.co.id/2016/10/pajak-negara-dan-pajak-daerah perpajakan.html. Diakses pada Tanggal 13 April 2018 Pukul 17:05 WIB

Jumingan , 2006.*Standar Akuntansi Keuangan,* Jakarta: Salemba Empat

Kementerian Keuangan. *Keuangan Negara* .Online. http://www.wikiapbn.org/keuangan-negara/. Diakses pada tanggal 30 November 2017 Pukul 07 : 20 WIB

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat* . online. https://www.kemenkeu.go.id/, Diakses pada tanggal 5 Desember 2017 Pukul 12:42 WIB.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STKIM YKPN.Yogyakarta.

Mania, Aklap. 2012. *Manfaat dan tujuan laporan keuangan.*http://aklapmania-bpn.blogspot.co.id/2012/12/manfaat-dan-tujuan-laporan-keuangan.html

Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.

Mirza, R. A. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010.* Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Mualidin, Isnaini. 2015. *Implementasi new public management (NPM) dalam pelayanan perizinan di dinas perizinan kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nordiawan, deddi,. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Munawir. 2004.*Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta : Liberty

Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.* Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Sofyan Syafri Harahap, 2006, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan,* Edisi 1-5 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Standar Akuntansi Keuangan. *Penyajian Laporan Keuangan.* 2018. http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-7-psak-1-penyajian-laporan-keuangan#. Diakses Tanggal 15 April 2018 Pukul 16:05 WIB

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta. https://gudangmodul.wordpress.com/2016/04/20/pemerintahan-pusat/. Diakses pada tanggal 30 November 2017 Pukul 07 : 20 WIB

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Cetakan Kelimabelas. Bandung : Alfabeta

Widiastuti, Indah. 2016. *Penerapan new public management (NPM)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Wilson & Kattelus, "Accounting For Govermental and Non Profit Entities" 2002 13th Edition, Irwin,North America.

Yusuf, Ahmad., dkk.2015. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Beberapa Negara.*seminar akuntansi pemerintahan.*

Zabillah, Risyen. 2013. *Akuntansi di Australia*.online http://risyenz.blogspot.co.id/2013/03/akuntansi-di-australia_31.html. Diakses tanggal 15 April 2018 Pukul 17:01 WIB.

Nomor: e-0401/SNA-23/2020

SNA 23 VIRTUAL 2020

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

SITI MAGHFIROH

Sebagai

PEMAKALAH

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XXIII

PERAN AKUNTAN PENDIDIK DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan Nilai 16 SKP

Diselenggarakan secara virtual pada tanggal 22 - 23 september 2020

Jakarta, 23 September 2020
Kompartemen Akuntan Pendidik IAI

Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CMA., CA
Ketua

This is an Electronically Generated Document. To Validate please email ppl@iaiglobal.or.id